

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG
(2003 – 2012)**

(Skripsi)

Oleh

Faizal



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN LAMPUNG PROVINCE 2003-2012

**by
Faizal**

This study aimed to determine the effect of income per capita and poverty level on the human development index in Lampung Province. The independent variables in this study are income per capita and poverty level. This study uses the ordinary least square method.

The results of this research showed that income per capita and poverty level significantly affected the human development index in Lampung Province during 2003-2012. Meanwhile, 85% of the human development index in Lampung Province can be explained by the independent variables in this research.

Key word: Human Development Index, Income Per Capita, Poverty Level

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG 2003-2012

Oleh

Faizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung tahun. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kuadrat terkecil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan secara signifikan (secara parsial dan serempak) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung periode 2003 – 2012. Sementara itu, sebesar 85% indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, Tingkat Kemiskinan

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG
(2003 – 2012)**

Oleh

Faizal

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi

**: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi
Lampung(2003 - 2013)**

Nama Mahasiswa

: Faizal

Nomor Pokok Mahasiswa

: 0911021102

Jurusan

: Ekonomi Pembangunan

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

[Signature]

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

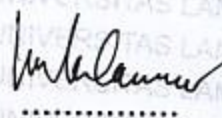
NIP. 196606211990031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

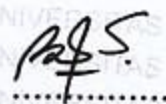
: MA. IrshanDalimunthe, S.E., M.si



Penguji

Bukan Pembimbing I

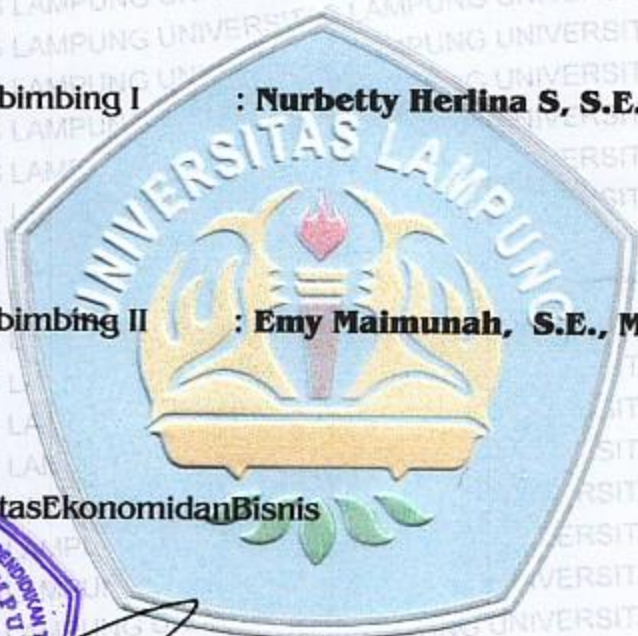
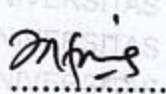
: Nurbetty Herlina S, S.E., M.E



Penguji

Bukan Pembimbing II

: Emy Maimunah, S.E., M.SI



2. Dekan Fakultas EkonomidandanBisnis



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.,M.Si.

NIP. 196109041987031011

Tanggal Lulus UjianSkripsi: 17 Januari 2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku.”

Bandar Lampung, 17 Januari 2017

Penulis



Faizal

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bangka pada tanggal 25 November 2015, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Zulkifli dan Zainab. Penulis memulai pendidikan formal di SDN 122 di Bangka Barat pada tahun 1996 dan dilanjutkan SMP YPRB pada tahun 2002 dan pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Perintis I Bandar Lampung .

Pada tahun 2009, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan diterima sebagai salah satu mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2009 hingga 2013, penulis aktif sebagai Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Lampung. Pada tahun 2011 penulis melaksanakan Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas). Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2012 di Desa Sukarame, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran selama 40 hari.

MOTO

“Tak Ada Fajar Yang Terbit Dari Terang.”

(Faizal)

PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan hati, doa, serta syukur kepada ALLAH S.W.T yang masih memberi

Nikmat Iman, Kesehatan Lahir Dan Batin

kupersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku dan saudara-saudariku yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa, dukungan moral, spiritual dan material yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita lalui selama ini. Perjuangan yang kita jalani bersama akan menjadi cerita indah nantinya.

Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lampung, sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya agar bisa lebih baik dan membanggakan.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat dan cinta-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung (Tahun 2003-2012)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak MA. Irshan Dalimunthe, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Nurbetty Herlina S.E.,M.Si selaku dosen penguji satu yang telah memeberikan arahan, masukan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emi Maimunah S.E.,M.Si selaku dosen penguji dua yang telah memeberikan arahan, masukan dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Tiara Nirmala, S.E., M.SC. selaku dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan arahannya dan semangatnya.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah dengan tulus mengajarkan dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Para staf dan pegawai di Jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Ayah Hi. Zulkifli , Emak Hj. Zainab , Abangku Rasyid, S.km., dan Ayuk ku Suci PS . Yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Hanya rasa syukur yang bisa terucap karena memiliki kalian.
11. Semua mahasiswa Ekonomi Pembangunan angkatan 2009, terima kasih atas kebersamaan dalam berbagi energi positif, dukungan untuk saling menguatkan, canda dan tawa serta haru yang melengkapi hari-hari kita serta segala hal yang kita jalani selama ini.
12. Teman-teman yang telah saling memberikan semangat dan bantuan satu sama lain dalam penyelesaian skripsi ini, perjuangan ini akan berakhir dengan indah.
13. Teman seperjuangan: Markus TW, Ely Fajar Laiya, Pandu aria , Desfa Satria , Mujayin , Nurul , Mediansyah R, Boy. Terima kasih atas petemanan yang tulus dan selalu menjadi orang-orang yang berada disampingku dan teman-

teman EP'09 yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih untuk cerita indah dan keceriaan yang telah dibagi selama ini.

14. Teman KKN yang telah berbagi pengalaman serta kebersamaan yang luar biasa selama masa KKN.
15. Keluarga Besar Pecinta Alam Lampung terima kasih dukungannya
16. Angkatan XIX 7 PURNAMA
17. Keluarga Besar Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) serta keluarga besar Ekonomi Pembangunan.
18. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini namun tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.

Akhir kata penulis hanya dapat berharap semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang indah untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 24 Juli 2017

Penulis

Faizal

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Hipotesis.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pembangunan Manusia.....	17
B. Indeks Pembangunan Manusia.....	19
1. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia.....	21
2. Komponen-komponen IPM.....	22
C. Produk Domestik Regional Bruto	24
1. Metode Langsung	25
2. Metode Tidak Langsung.....	26
D. Kemiskinan	27
1. Pengertian Kemiskinan	27
2. Penyebab Kemiskinan.....	29
E. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM	31
1. Hubungan antara Pendapatan per Kapita dengan IPM	31

2. Hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan IPM.....	32
---	----

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data	37
B. Definisi Operasional Variabel.....	37
C. Metode Analisis	38
D. Uji t Statistik.....	39
E. Uji F Statistik	40
F. Uji Koefisien Determinasi.....	40
G. Pengujian Asumsi Klasik	41
1. Uji Multikolinieritas	41
2. Uji Heterokedastisitas	42
3. Uji Autokorelasi	43
4. Uji Normalitas	43

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung	45
B. Analisis Data	48
C. Uji Asumsi Klasik	49
1. Hasil Uji Multikolinieritas	49
2. Hasil Uji Heterokedastisitas	50
3. Hasil Uji Autokorelasi.....	51
4. Hasil Uji Normalitas.....	52
D. Hasil Uji Hipotesis	53
1. Hasil Uji Parsial (t)	53
2. Hasil Uji Serempak (f)	55
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
E. Pembahasan.....	56
1. Pendapatan per Kapita	56
2. Tingkat Kemiskinan.....	57

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Lampung (2008-2012)	8
2. Indeks Pembangunan Manusia Antar Manusia di Sumatera	9
3. Indeks Gini Antar Provinsi di Sumatera	10
4. Penelitian Terdahulu	34
5. Wilayah Administrasi Provinsi Lampung	48
6. Uji Multikolinieritas	50
7. Hasil Uji Heterokedastisitas	51
8. Hasil Uji Autokorelasi	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran	16
2. Hasil Uji Normalitas	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Indeks Pembangunan Manusia, Pendapatan Per Kapita, dan Tingkat Kemiskinan Periode Tahun 2003-2012	L1
2. Hasil Regresi.....	L2
3. Hasil Uji Multikolinieritas	L3
4. Hasil Uji Heterokedastisitas	L4
5. Hasil Uji Autokorelasi	L5
6. Hasil Uji Normalitas	L7

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Bericara pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Muara dari pembangunan itu sendiri tak lain adalah soal pemerataan kesejahteraan, yang mana hal tersebut mencakup soal peningkatan pendidikan, hilangnya pengangguran, tingginya angka harapan hidup, dan turunnya tingkat kemiskinan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan (United Nation Development Programme, UNDP). Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia

dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup.

Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*).

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik

sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, segala isu dan indikator perekonomian selalu bicara soal manusia.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kesenambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan,

kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno, 2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang

besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan. Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya

merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif, sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dapat tercapai.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut (Mankiw, 2008), pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Studi Alesinadan Rodric (lihat Meier dan Rauch, 2000) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi

langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya untuk mengeluarkan kelompok masyarakat miskin dari siklus terbut. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin(Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Dalam kasus Lampung sendiri, data publikasi BPS memperlihatkan bahwa secara absolut, IPM Lampung telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Di Lampung (2008-2012)

Tahun	IPM
2008	70.3
2009	70.93
2010	71.42
2011	71.94
2012	72.45

Sumber: BPS

Capaian kinerja IPM Lampung memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Lampung ke level yang diharapkan. Hal ini dikarenakan menurut data BPS, IPM Lampung pada tahun 2012 masih berada pada posisi ke 23 dari 33 provinsi di Indonesia.

Sementara itu di Sumatera, posisi IPM Lampung berada pada posisi yang terakhir. Capaian ini masih tampak jauh dari posisi yang ditargetkan. Bahkan capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia Antar Provisnsi di Sumatera

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	70,35	70,76	71,31	71,7	72,16	72,51
Sumatera Utara	72,78	73,29	73,8	74,19	74,65	75,13
Sumatera Barat	72,23	72,96	73,44	73,78	74,28	74,7
Riau	74,63	75,09	75,6	76,07	76,53	76,9
Jambi	71,46	71,99	72,45	72,74	73,3	73,78
Sumatera Selatan	71,4	72,05	72,61	72,95	73,42	73,99
Bengkulu	71,57	72,14	72,55	72,92	73,4	73,93
Lampung	69,78	70,3	70,93	71,42	71,94	72,45
Kepulauan Bangka Belitung	71,62	72,19	72,55	72,86	73,37	73,78
Kepulauan Riau	73,68	74,18	74,54	75,07	75,78	76,2

Sumber: BPS

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2007 – 2012 IPM Lampung merupakan yang terendah dibanding dengan Provinsi-provinsi lain di Sumatera. Dari table di atas jelas dapat dilihat ahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung merupakan yang terendah di Pulau Sumatera. Hal ini sedikit ironis mengingat dari sisi sumber daya dan lokasi, Provinsi Lampung merupakan penghubung dari dua kepulauan besar di Indonesia, yakni Sumatera – Jawa. Yang mana merupakan pintu gerbang dari jalur distribusi di kedua pulau tersebut.

Sementara itu, rendahnya indeks pembangunan manusia tentu akan berimbas pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi. Ini dapat dilihat dari angka koefisien gini yang terjadi pada Provinsi-provinsi di Sumatera, di mana dalam kurun waktu 2007 – 2012 angka koefisien gini Lampung secara rata-rata berada di

peringkat terbawah. Hal ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat memiliki korelasi yang nyata terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 3 Indeks Gini Antar Provinsi di Sumatera

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	0,268	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32
Sumatera Utara	0,307	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33
Sumatera Barat	0,305	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36
Riau	0,323	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40
Jambi	0,306	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34
Sumatera Selatan	0,316	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40
Bengkulu	0,338	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35
Lampung	0,390	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36
Kepulauan Bangka Belitung	0,259	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29
Kepulauan Riau	0,302	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35

Sumber: BPS

Indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Terlebih jika mengingat kondisi ipm Lampung yang saat ini berada di bawah rata-rata nasional, maka kebijakan yang berkualitas perlu segera dirumuskan untuk mengangkat kualitas hidup masyarakatnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Lampung. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Lampung Periode 2003-2013**”.

B. Rumusan Masalah

IPM yang terjadi di setiap region (daerah) menggambarkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Hal ini berarti diperlukan sebuah identifikasi yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi sendiri menggambarkan peningkatan produktivitas yang terjadi dalam suatu wilayah. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari suatu wilayah berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang rendah menggambarkan kelesuan produktivitas masyarakat di dalamnya. Dan pada akhirnya akan memperlambat pendapatan yang diperoleh masyarakat.

Sementara itu, kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif, khususnya di bidang pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan per kapita terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber informasi kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.
2. Penelitian ini menjadi sumber pengetahuan dan informasi tentang seberapa besar pengaruh pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung, sehingga dapat dijadikan referensi tambahan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
3. Sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti, mahasiswa dan dosen yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berupaya mengidentifikasi pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder dari tahun 2003 - 2013 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Studi Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, serta Bab V Penutup.

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan fakta serta pengamatan yang menggambarkan permasalahan penelitian.

BAB II Studi Pustaka

Merupakan bab yang berisi telaah pustaka, berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi daerah, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori-teori tentang perencanaan pembangunan ekonomi daerah.

BAB III Metodologi Penelitian

Merupakan metode penelitian, berisi tentang jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data yang menjelaskan estimasi serta pembahasan yang menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup

Merupakan penutup berisi kesimpulan hasil analisis data pembahasan.

G. Kerangka Pemikiran

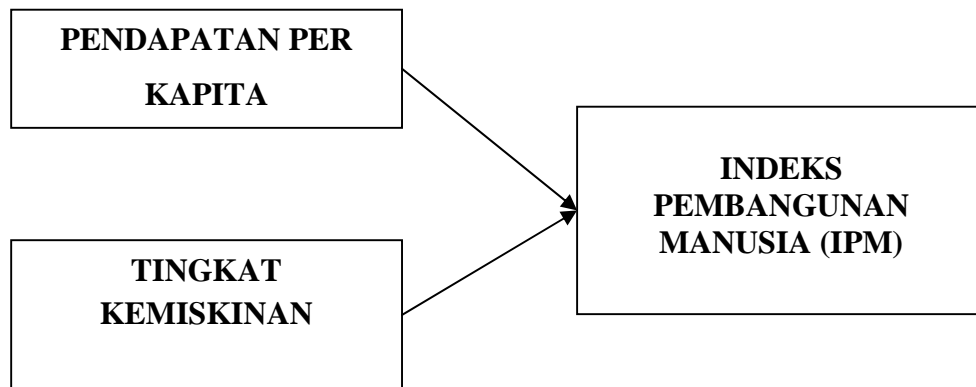
Sesuai dengan latar belakang di atas bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan produktivitas masyarakat dalam suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu.

Sementara itu, kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Penelitian ini dimulai dengan mengukur pendapatan per kapita yang terjadi di Provinsi Lampung. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung serta kontribusi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan.

Dan langkah terakhir yang dilakukan adalah menganalisa pengaruh pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. Dalam mengukur hubungan tersebut digunakan metode regresi berganda (OLS).

Berikut adalah gambar skema kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tinjauan pustaka dan berbagai hasil kajian empiris yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian untuk tujuan penelitian yang ketiga sebagai berikut:

- a. Diduga pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.
- b. Diduga tingkat kemiskinan memiliki pengaruh negatif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal means*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu

diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/pejuang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembangunan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik,

budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

B. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar

hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (infant mortality rate); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

1. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

- a. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

Dimana:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1,2,3$

X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max}X_i$ = Nilai maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai minimum X_i

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min} X_i}{\text{Max} X_i - \text{Min} X_i}$$

2. Komponen-komponen IPM

a. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat.

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia

tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

c. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

C. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu wilayah adalah dengan menggunakan besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB disajikan atas dasar harga berlaku (sesuai dengan pasar/transaksi pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga pasar pada tahun tertentu).

Perubahan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun penghitungan masih memuat akibat terjadinya inflasi/deflasi sehingga tidak memperlihatkan pertumbuhan atau perubahan PDRB secara riil. Sebaliknya, PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pasar pada tahun tertentu, sehingga perubahan besaran PDRB sudah terlepas dari pengaruh inflasi/deflasi.

Besar kecilnya PDRB yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah/daerah dipengaruhi oleh besarnya sumberdaya alam yang telah dimanfaatkan dan macamnya, jumlah dan mutu sumberdaya manusia, kebijaksanaan pemerintah, letak geografis serta tersedianya sarana dan prasarana. Dalam menghitung pendapatan regional, BPS (1995) memasukkan seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yaang melakukan usahanya disuatu wilayah atau daerah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksi. Dengan demikian, PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut. Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu:

1. Metode Langsung

Dalam menghitung PDRB dengan metode langsung, penghitungan didasarkan sepenuhnya kepada data daerah yang terpisah dari data nasional, sehingga hasil penghitungannya mencakup seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Dalam metode ini PDRB dapat diukur dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan produksi

PDRB merupakan jumlah barang dan jasa terakhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 (sebelas) sektor, yaitu: (1) pertanian; (2) pertambangan dan galian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air minum; (5) bangunan; (6) perdagangan; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) bank dan lembaga keuangan lainnya; (9) sewa rumah; (10) pemerintahan; (11) jasa-jasa.

b. Pendekatan pendapatan

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu setahun. Balas jasa produksi tersebut meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya dihitung sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam hal ini mencakup juga penyusutan dan pajak-pajak tak langsung neto. Jumlah komponen pendapatan persektor disebut *nilai tam bah*

bruto sektoral. Oleh sebab itu, PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan penjumlahan dari nilai tambah bruto seluruh sektor atau lapangan usaha.

c. Pendekatan pengeluaran

Menurut pendekatan ini PDRB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir, meliputi (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan; (2) pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok; (3) pengeluaran konsumsi pemerintah; (4) ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor), dalam jangka waktu satu tahun.

2. Metode Tidak Langsung/Alokasi

Dalam melakukan perhitungan PDRB melalui metode tidak langsung/alokasi penghitung dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah suatu kelompok kegiatan ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah nasional kedalam masing-masing kegiatan ekonomi pada tingkat regional. Sebagai alokator digunakan indikator yang paling besar pengaruhnya atau erat kaitannya dengan produktivitas kegiatan ekonomi tersebut.

Penghitungan PDRB pada suatu wilayah/daerah dengan menggunakan metode langsung atau tidak langsung/alokasi sangat tergantung pada data yang tersedia. Pada dasarnya, pemakaian kedua metode tersebut akan saling menunjang satu sama lain, karena penghitungan dengan metode langsung akan mendorong peningkatan mutu atau kualitas data daerah, sedangkan penghitungan dengan metode tidak langsung merupakan koreksi dan pembanding bagi data daerah.

Dilihat dari penjelasan di atas, PDRB dari suatu wilayah lebih menunjukkan pada besaran produksi suatu daerah, bukan pendapatan yang sebenarnya diterima oleh penduduk di daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian, PDRB merupakan data yang paling representatif dalam menunjukkan pendapatan dibandingkan dengan data-data lainnya.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai

bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Delina Hutabarat (1994), menyebutkan sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang ditanggung komunitas yaitu : 1. Kemiskinan Subsistensi yaitu penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal. 2. Kemiskinan Perlindungan yaitu lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah. 3. Kemiskinan Pemahaman yaitu kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan, dan potensi untuk mengupayakan perubahan. 4. Kemiskinan Partisipasi yaitu tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. 5. Kemiskinan Identitas yaitu terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. 6. Kemiskinan Kebebasan yaitu stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*very poor*) dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 2240 kg, 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori *food* dan *nonfood*

diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan.

2. Penyebab Kemiskinan

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1. *Policy induces processes*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic Dualism*, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population Growth*, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and The Environment*, yaitu adanya unsur misalnya manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural Cycles and Processes*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis =, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal terus-menerus.
6. *The Marginalization of Woman*, yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and Ethnic Factors*, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan

nelayan ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat keagamaan. 8. *Exploitative Intermediation*, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat). 9. *Internal Political Fragmentation and Civil strife*, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. 10. *International Processes*, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu : 1. *Natural Assets*; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. 2. *Human Assets*; menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 3. *Physical Assets*; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. 4. *Financial Assets*; berupa tabungan (*saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 5. *Social Assets*; berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *bargaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

E. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap IPM

1. Hubungan antara Pendapatan per Kapita dengan IPM

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendedkatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004). Pada akhirnya pendapatan masyarakat memiliki hubungan yang positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Hubungan antara Tingkat Kemiskinan dengan IPM

Menurut UNDP (1996) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Todaro (2000) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari jumlah penduduk miskin tersebut, atau dengan kata lain

dengan berkurangnya penduduk miskin maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya.

Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Penulis (1)	Variabel (2)	Alat Analisis (3)
1.	Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Komponen IPM • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif Kuantitatif
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program di kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang positif dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. • Capaian IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode Tahun 2007-2011 mengindikasikan adanya pengurangan jarak capaian IPM terhadap nilai IPM ideal dan cenderung bersifat fluktuatif. • Kontribusi masing-masing komponen terhadap pembentukan IPM Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2007-2011 menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan selalu mendominasi dengan rata-rata 37,78 persen yang kemudian diikuti oleh dimensi hidup panjang rata-rata 34,16 persen. Sementara hidup layak berada pada posisi ketiga dengan rata-rata kontribusi sebesar 28,06 persen selama periode observasi. 			
2.	Analisis hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi terhadap Kemiskinan Di Indonesia (studi kasus 38 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dan 2010). Purwiyanti Septina Franciari (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan • IPM • Kapasitas Fiskal • Tingkat Korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)

	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil dan Kesimpulan dari penelitian ini adalah Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 variabel IPM, kapasitas fiskal dan korupsi berpengaruh negatif secara tidak signifikan pada $\beta = 5$ persen dan $\beta = 10$ persen terhadap kemiskinan. • Pada tahun 2010 variabel kapasitas fiskal berpengaruh negatif secara signifikan pada $\beta = 10$ persen terhadap kemiskinan, sedangkan IPM dan korupsi berpengaruh negatif secara tidak signifikan. Berdasarkan hasil kausalitas granger, terdapat perbedaan pola perilaku antara tahun 2008 dan 2010. 		
3.	<p>Indeks Pembangunan Manusia Indonesia: Mohamad Bakti & Abdul Hakim (2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPM • PDB • Pajak Pendapatan • Krisis Ekonomi • Desentralisasi Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Error Correction Model
	<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian menemukan bahwa <i>PDB</i> dan <i>PPN</i> secara signifikan mempengaruhi <i>IPM</i>. Hasil estimasi model ECM menunjukkan bahwa <i>PDB</i>, <i>PPN</i>, dan krisis ekonomi tahun 2008 pengaruhi <i>IPM</i>, meskipun <i>PPN</i> hanya mempengaruhi dengan tingkat signifikansi 10%. • <i>PDB</i> berpengaruh positif terhadap <i>IPM</i>, karena peningkatan <i>PDB</i> akan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Seperti diharapkan juga, <i>PPN</i> berpengaruh negatif terhadap <i>IPM</i> karena peningkatan pajak pemerintah mengurangi <i>disposable income</i>, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. • <i>DD</i> tidak berpengaruh secara positif terhadap <i>IPM</i> yang berarti bahwa desentralisasi pemerintahan belum mampu diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 		
4.	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • IPM • Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode Kuadrat Terkecil

Selatan (Devianti Patta, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kemiskinan • Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Kesehatan • Ketimpangan Pendapatan 	
<p>Hasil :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai $\text{sig} = 0,002 < 0,05$, karena nilai sign kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti. • Pengaruh jumlah persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti ada pengaruh negatif dan signifikan dengan IPM. • Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai $\text{sig} = 0,08 < 0,05$, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM yang memiliki nilai $\text{sig} 0,013 < 0,05$, karena nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti. • Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM yang menunjukkan nilai $\text{sig} 0,001 < 0,05$ berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM. 		

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dengan rentang waktu dari tahun 2003 -2012. Tipe data yang digunakan adalah data runtut waktu (*time series*) di Provinsi Lampung yang meliputi data indeks pembangunan manusia, PDRB ADHK 2000, tingkat kemiskinan, dan jumlah penduduk.

Sementara itu menurut sumbernya, data yang digunakan adalah data sekunder .

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari pihak kedua. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi). Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989) memberi batasan tentang definisi operasional adalah : “definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel”.

Dalam penelitian ini definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam satuan persen.
2. Pendapatan per kapita merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan tingkat produksi yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut.
3. Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau kehidupan minimum terhadap total penduduk Lampung menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS) dalam satuan persen.

C. Metode Analisis

Dengan menganalisis data yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat menggunakan model ekonometrika dengan meregresikan variabel-variabel yang ada dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Data-data yang digunakan, dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik yaitu persamaan regresi linear berganda. Variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, \dots) \dots \dots \dots 1$$

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan kedalam model persamaan linear berganda (*multiple regression*) dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu \dots \dots \dots 2$$

Dimana :

Y = Indeks pembangunan manusia (persen)

α_0 = Intercept

X_1 = Pendapatan Per Kapita (rupiah)

X_2 = Persentase penduduk miskin (persen)

β_1, β_2 = Koefisien regresi

μ = Terms of error

D. Uji t Statistik

Uji t-statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji t ini digunakan perumusan bentuk hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = b$$

$$H_a : \beta_i \neq b$$

Dimana β_i adalah koefisien variabel independen ke I nilai parameter hipotesis dan biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X_i terhadap Y . pengujian dilakukan melalui uji-t dengan membandingkan t-statistik dengan t-tabel.

$$\text{Nilai t- hitung : } \frac{\beta_i - b}{Se(\beta_i)}$$

E. Uji F Statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut :

Ho : $b_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

Ha : $b_1 \neq 0$(ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F- tabel. Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka Ho ditolak artinya variabel dependen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Dan jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka Ho diterima artinya variabel Independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus :

$$F - \text{Hitung} = \frac{R^2 / (K - 1)}{1 - (R^2) / (n - K)}$$

Di mana :

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variable independen

n = Jumlah sampel

F. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama-sama memberi penjelasan terhadap variabel dependen dimana nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) semakin besar

nilai R^2 maka semakin besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel independen yang dapat dijelaskan oleh variabel dependen.

G. Pengujian Asumsi Klasik

Ada beberapa masalah yang akan terjadi dalam model regresi linier dimana secara statistik permasalahan tersebut dapat mengganggu model yang telah ditentukan, bahkan dapat menyesatkan kesimpulan yang diambil dari persamaan yang terbentuk, untuk itu perlu melakukan uji penyimpangan klasik yang terdiri dari :

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana.

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya hubungan yang sempurna atau tidak sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat ciri-ciri yaitu adanya R^2 yang tinggi. Klien mengatakan bahwa multikolinieritas dapat menjadi masalah bila derajat multikolinieritasnya tinggi. Jika derajatnya rendah maka multikolinieritas yang terjadi tidak terlalu serius dan tidak membahayakan bagi interpretasi hasil regresi.

Melalui metode yang dikemukakan oleh Klien, derajat kolinieritas dapat dilihat melalui koefisien determinasi parsial dari regresi antara variabel independen dengan variabel independen yang lain dipergunakan dalam metode penelitian..

Salah satu cara untuk mengetahui adanya multikolinier adalah dengan langkah pengujian terhadap masing –masing variabel independen untuk mengetahui seberapa jauh korelasinya (r^2) kemudian dibandingkan dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen dengan variabel dependen, jika ditemukan nilai r^2 melebihi nilai R^2 pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika R^2 lebih besar dari semua r^2 maka ini menunjukkan tidak terdapatnya multikolinier pada model persamaan yang diuji.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas atau varians tak sama adalah kejadian dimana meskipun tingkat variabel dependen (Y) naik seiring dengan naiknya tingkat variabel independen (X), namun varians dari variabel dependen tidak tetap sama di semua tingkat variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode White. Uji White menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependen, dan variabel independennya terdiri atas variabel independen yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independen, ditambah lagi dengan perkalian variabel independen.

Kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan besar nilai χ^2 -hitung ($Obs * R-squared$) dengan nilai χ^2 -tabel (*chi square*) sebagai berikut:

- a. Jika nilai x^2 - hitung $<$ nilai x^2 - tabel, maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah heteroskedestisitas.
- b. Jika nilai x^2 - hitung $>$ nilai x^2 - tabel, maka dapat dikatakan terdapat masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah adanya hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Autokorelasi dapat terjadi apabila kesalahan pengganggu suatu periode korelasi dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya.

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi hubungan korelasi kesalahan pengganggu antar periode waktu. Dalam penelitian ini digunakan metode Breusch- Godfrey atau yang biasa dikenal juga dengan metode LM (*Langrange Multiplier*). Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai $Obs * R\text{-squared} >$ nilai X^2 - tabel atau nilai *Probability* $Obs * Rsquared < 0.05$, maka terjadi autokorelasi.
- b. Jika nilai $Obs * R\text{-squared} <$ nilai X^2 -tabel atau nilai *Probability* $Obs * Rsquared > 0.05$, maka tidak terjadi autokorelasi.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kenormalan eror term dan variabel-variabel baik variabel bebas maupun terikat, apakah data sudah menyebar secara normal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Jarque-Bera. Metode Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal.

Jika residual terdistribusi secara normal maka diharapkan nilai statistik JB akan sama dengan nol. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai $JB\text{-hitung} < X^2$ tabel, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai $JB\text{-hitung} > X^2$ tabel, maka dapat dikatakan data tidak mengikuti distribusi normal.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.
2. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.
3. Variabel pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung
4. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung dapat dijelaskan secara signifikan oleh variabel penentu dalam model.

B. Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan pendapatan per kapita dan tingkat kemiskinan yang terbukti signifikan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, sehingga pemerintah Provinsi Lampung beserta kabupaten/kota terkait dapat membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan per kapita dan pengentasan kemiskinan guna yaitu dengan peningkatan lapangan kerja

serta peningkatan dalam partisipasi pendidikan sehingga dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung.

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan angka partisipasi pendidikan yang akan diteliti . Sehingga variabel yang diteliti nantinya mampu menjelaskan secara baik faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang tidak dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- , 2006, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Penerbit : PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Boediono, 1999, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE UGM Yogyakarta
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
- Corel Asion, 2009 , Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Penanaman Modal Asing dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (Skripsi tidak dipublikasikan)
- Dalimunthe, Masniari. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara*.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Emil Salim, 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hendra Esmara, 1986, *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia*. (Jurnal Elektronik) diakses 08 Oktober 2010.
- Hutabarat, 1994, *Kebijakan Pembangunan dan Kemiskinan*. (Jurnal Elektronik) diakses 1 Oktober 2010 ; <http://www.stiemuttaqien.ac.id>
- Ilham Irawan, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Jhingan, ML. 1990. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : CV. Rajawali. (Terjemahan).

- M, Alex Febrianto, 2009. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. (Skripsi : tidak dipublikasikan).
- Mangkoesebroto, Guritno, 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Nopirin, 2000, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro II*. BPFE UGM, Yogyakarta
- Samuelson, Paul & D. Nordhaus, William, 1992, *Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta
- Suharto. 2001. Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001.
- Sukirno, Sadono, 2002, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith, 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Penerbit Erlangga.